

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agustina, dkk. 2016. *Penafsiran Unsur Melawan Hukum dalam Pasal 2 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: LeIP.
- Ainul Syamsu, Muhammad. 2014. *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan: Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: KencanaLumbangaol, Frandonal. 2022. *Pemberantasan Korupsi Terhadap Pelaku Medepleger (Turut Serta)*. Jawa Barat: Adab.
- Ainul Syamsu, Muhammad. 2016. *Penjatuhan Pidana Dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Alfitra. 2014. *Modus Operandi Pidana Khusus di Luar KUHP*. Jakarta. Raih Asa Sukses.
- Ali, Mahrus. 2015. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Ali, Mahrus dan Deni, Setya. 2020. *Delik-Delik Korupsi*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Ali, Mahrus dan Deni, Setya. 2020. *Delik-Delik Korupsi*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Amir, Ilyas. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.
- Chazawi, Adami. 2017. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hanifah, Erma. 2019. *Stop Korupsi*. Tangerang: Loka Aksara.
- Ishaq. 2016. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Jaholden. 2021. *Reformulasi Hukum Pidana*. Medan: Budapest International Research And Critics University.
- Kristian dan Gunawan Yopi. 2015. *Tindak Pidana Korupsi Kajian Terhadap Harmonisasi Antara Hukum Nasional dan The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*. Jakarta: Refika Aditama.

- Lamintang, P.A.F dan Franciscus Theojunior, Lamintang. 2014. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Lamintang, Theo dan Lamintang, P.A.F, 2015, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan tertentu sebagai Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F. 2016. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Margono. 2019. *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Ode, La. 2020. *Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Semarang: CV Pilar Nusantara.
- R, Soesilo. 2013. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Pasal Demi Pasal*. Jakarta. Politea.
- Suratman dan Philips, Dillsh. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- Syamsuddin, Aziz. 2016. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tinuk, Dwi. 2021. *Pidana Mati Korupsi: Perspektif Hukum Positif dan Islam*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Toto, R. 2021. *Arti Korupsi dan Ciri-ciri Korupsi: Seri Ensiklopedi Pendidikan Anti Korupsi*. Hikam Pustaka.
- Wahyuni, Fitri. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: Persada Nusantara Utama.
- Yanuar, Taufik. 2022. *Hukum Pidana*. Jakarta. PT. Sangir Multi Usaha.
- Wahyuni, Fitri. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: Persada Nusantara Utama.

PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang No.1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Wetboek van Strafrecht sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 2951).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 157 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5076).

JURNAL

Ante, Siti. (2013). "Pembuktian dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana". *Lex Crimen* Vol. II/No. 2/Apr-Jun/2013. (hlm 1).

Arif Muhammad dan Mahrus, Ali. (2021). "When Double Intention Ignored: A Study Of Corruption Judicial Decisions". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No.3 Vol. 28 (hlm 460).

Arif Setiawan, Muhammad dan Ali, Mahrus. (2021). "When Double Intention Ignored: A Study of Corruption Judicial Decisions". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Volume 28 Nomor 3 (hlm 460).

Azmi, Nurul dan Aby Maulana. (2021). "Konstruksi Turut Serta Melakukan (*medeplegen*) Oleh korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia" *Al-Qisth Law Review* Vol 5 No.1 (hlm 14).

Fadhil, Muhammad dan Rugun, Romaida (2021). "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku yang Diduga Turut Melakukan (*Medepleger*) Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Kasus Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 22/PID.SUS-TPK/2020/PN.JKT.PST. *Jurnal Hukum Adigama*, Volume 4 Nomor 2. (hlm 460).

Fahrurrozi dan Samsul, Bahri. (2019). "Sistem Pidanaaan Dalam Penyertaan Tindak Pidana Menurut KUHP". *Media Keadilan:Jurnal Ilmu Hukum* (hlm 56).

Fathoni, Muhammad. (2021). "Tinjauan Yuridis Atas Perbuatan Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Kredit Bank". *Bandung Conference Series: Law Studies*, Volume 1, No. 1. (hlm 3).

Fahrurrozi dan Samsul, Bahri. (2019) "Sistem Pidanaaan Dalam Penyertaan Tindak Pidana Menurut KUHP". *Media Keadilan:Jurnal Ilmu Hukum* (hlm 56).

Helmi, dkk. (2022). "Tinjauan Tentang Pembuktian Unsur Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain Atau Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi". *Diponegoro Law Journal*, Vol. 11 No. 2. (hlm 7).

Linda Ulfa, Mohd. Din, Dahlan, 2017, Penerapan Ajaran Turut Serta Kasus Korupsi Dikaitkan Teori Pertanggungjawaban Pidana, *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19 No. 2.

Rahromana, Basir. (2017). "Penerapan Ajaran Penyertaan Turut Serta Tindak Pidana Korupsi". *Yuridika: Fakultas Hukum Universitas Airlangga*. Volume 32 No. 2. (hlm 224).

Sitompul, Herman. (2019). "Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi". Volume 6 Nomor 2, September 2019. (hlm 119).

S.R. Chant. (2017). "Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP". *Lex Crimen* Vol. VI/No.6 (hlm 34).

Unas, Sandro. (2019). "Kajian Yuridis Terhadap Bentuk Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi". *Lex Et Societatis*, Vol.VII/No.4/Apr/2019 (hlm 60). Winarno, Andrias, dkk. (2021). "Kekaburan Norma dalam Pasal 55 Undang-Undang No.24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial". *Media Luris*, Vol.4 No.3, Oktober 2021 (hlm 384).

Yonna B. Salamor. (2014). "Analisis Yuridis Ajaran Turut Serta Dalam Kasus Abortus Provocatus Dengan Alasan Kegagalan Kontrasepsi". *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon 'SASI'*. (hlm 25).

Vandrixton, Jerol. (2013). "Analisa Keyakinan Hakim Dalam Pengambilan Keputusan Perkara Pidana". *Lex Crimen* Vol. II/No. 3/Juli/2013. (hlm 1).

SKRIPSI

Rayanda, Nindya Putri.2021. *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Deelneming Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam*. Skripsi. Universitas Islam Negeri AR-Raniry. Darussalam Banda Aceh.

Swatika, Alifia. 2019. *Penyertaan Dalam Delik Jabatan Dalam Pada Tindak Pidana Korupsi*. Skripsi.Universitas Airlangga. Surabaya.

Taufik,Muhammad. 2018. *Analisis Hukum Terhadap Turut Serta Dalam Tindak Pidana Korupsi Dana Investasi Daerah (Analisis Putusan No: 70/Pid.Sus/2011/PN.SBY)*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan.

INTERNET

Ferinda, K. 2022. "Mengenal Jenjang Karier Profesi Panitera". Tersedia pada : <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-jenjang-karier-profesipanitera-lt62f3b51074795> (diakses tanggal 2 November 2022).

Hali, Ilman. 2012. Ancaman Pidana Untuk Orang yang Turut Serta Melakukan Korupsi. Tersedia di <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tindak-pidana-korupsi-lt507e81322f2c> (di akses pada 10 November 2022).

Patriani, Fepi. (2022). "Unsur Kesengajaan Dalam Hukum Pidana". Tersedia pada <https://konspirasikeadilan.id/artikel/unsur-kesengajaan-dalam-hukum-pidana0463> (diakses pada 2 Februari 2023).

Rose, Nikita. 2021. "Apa yang Dimaksud Kerjasama? Ini Pengertian, Tujuan dan Bentuknya". Tersedia pada <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5867133/apa-yang-dimaksud-kerja-sama-ini-pengertian-tujuan-dan-bentuknya#:~:text=Charles%20H.%20Cooley%2C%20sosiolog%20Amerika,sendiri%20untuk%20memenuhi%20kepentingan%20tersebut.> (diakses pada 2 Februari 2023).

Sugali. 2022 "Pertimbangan Hakim Bersifat Non-Yuridis". Tersedia pada <https://sugalilawyer.com/pertimbangan-yang-bersifat-non-yuridis/> (diakses pada 2 November 2022).

Sugali. 2022. "Pertimbangan Yang Bersifat Yuridis". Tersedia pada <https://sugalilawyer.com/pertimbangan-yang-bersifat-yuridis/#:~:text=Pertimbangan%20yang%20bersifat%20yuridis%20adalah,harus%20dimuat%20di%20dalam%20putusan.> (diakses pada 2 November 2022).

